

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit

Jakarta Timur- DKI Jakarta 13440

Telp. 86902313 Fax. 86902314

e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902313 Fax. 86902314

e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

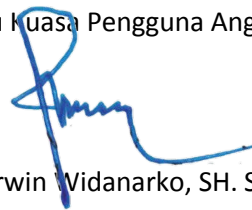
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Januari 2020
Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Erwin Widanarko, SH. S. AP. M. Pd
NIP. 19640114.198703.1.003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902313 Fax. 86902314 e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2020
Sekretaris
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. Erwin Widanarko, SH. S. AP. M. Pd
NIP. 19640114.198703.1.003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.35.502.421,- atau mencapai 210,40 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp.16.873.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.26.925.946.817,- atau mencapai 99,71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.27.005.006.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.24.093.511.560,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.18.365.060,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.24.075.146.500,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.24.093.511.560,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.28.210.961,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.27.051.872.202,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.27.023.661.241,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.8.448.813,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.27.015.212.428).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp.24.588.320.929,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp.27.015.212.428),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp.534.883.571),-. Dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.26.973.255.940,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.24.011.480.870,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

- Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	16.873.000	35.502.421	210,41
JUMLAH PENDAPATAN		16.873.000	35.502.421	-
BELANJA				
	B.2			
Belanja Pegawai	B.3	24.334.675.000	24.324.401.195	99,96
Belanja Barang	B.4	2.493.331.000	2.428.461.266	97,40
Belanja Modal	B.5	177.000.000	171.840.300	97,08
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-
JUMLAH BELANJA		27.005.006.000	26.924.702.761	99,70

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NERACA

PER 31 Desember 2019 DAN 2018

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.4	-	-
<i>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (neto)</i>	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	18.365.060	26.789.925
Jumlah Aset Lancar		18.365.060	26.789.925
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Bukan Pajak	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.12	-	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASE TETAP			
Tanah	C.14	20.367.671.000	21.710.894.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.573.226.376	4.317.330.476
Gedung dan Bangunan	C.16	3.485.802.000	2.646.375.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	49.563.000	49.563.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	20.865.646	20.865.646
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.421.981.522)	(4.125.436.779)
Jumlah Aset Tetap		24.075.146.500	24.619.591.343

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	34.075.000	34.075.000
Aset Lain-lain	C.22	3.502.880	440.101.526
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(37.577.880)	(474.176.526)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.093.511.560	24.646.381.268
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	82.030.690	57.610.708
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	449.631
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		82.030.690	58.060.339
JUMLAH KEWAJIBAN		82.030.690	58.060.339
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	24.011.480.870	24.588.320.929
JUMLAH EKUITAS		24.011.480.870	24.588.320.929
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.093.511.560	24.646.381.268

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 Desember 2019 DAN 2018

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	28.210.961	21.086.780
JUMLAH PENDAPATAN		28.210.961	21.086.780
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	34.345.420.615	21.977.762.121
Beban Persediaan	D.3	98.560.430	65.348.035
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.705.254.583	940.870.988
Beban Pemeliharaan	D.5	546.432.203	749.710.487
Beban Perjalanan Dinas	D.6	90.747.200	136.462.918
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	265.457.171	240.650.902
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(8.426)
JUMLAH BEBAN		37.051.872.202	24.110.797.025
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(27.023.661.241)	(24.089.710.245)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		7.001.090	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.892.868	-
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	732.908
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.892.868	1.108.463
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		445.145	375.555
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.447.723	732.908
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	(24.088.977.337)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(27.015.212.428)	(24.088.977.337)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	24.588.320.929	5.950.882.235
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(27.015.212.428)	(26.411.406.279)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(534.883.571)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	(503.796.000)	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(31.087.572)	-
LAIN-LAIN	E.3.6	1	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		26.973.255.940	24.005.068.115
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(576.840.059)	(83.909.222)
EKUITAS AKHIR	E.5	24.011.480.870	(24.588.320.929)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung” yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Megupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.
7. Peningkatan kualitas hakim.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16.873.000	16.873.000
Jumlah Pendapatan	16.873.000	16.873.000
BELANJA		
Belanja Pegawai	19.416.541.000	24.334.675.000
Belanja Barang	1.957.965.000	2.493.331.000
Belanja Modal	135.000.000	177.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
JUMLAH BELANJA	21.509.506.000	27.005.006.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan:
Rp.35.502.421,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.35.502.421,- atau mencapai 210.40 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.16.873.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.873.000	22.495.930	133
3	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	-	7.001.090	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	740.000	-
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	5.265.401	-
	Total Pendapatan	16.873.000	35.502.421	210

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.495.930	20.456.557	2.039.373	9,97
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	7.001.090	-	7.001.090	-
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5.265.401	-	5.265.401	-
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	-	2.765.048	(2.765.048)	(100,00)
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	740.000	38	739.962	0,01
6	Pendapatan Penyelesaian TGR	-	-	-	-
Total Pendapatan		35.502.421	23.221.643	12.280.778	52,89

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara :
Rp.26.925.946.817,-

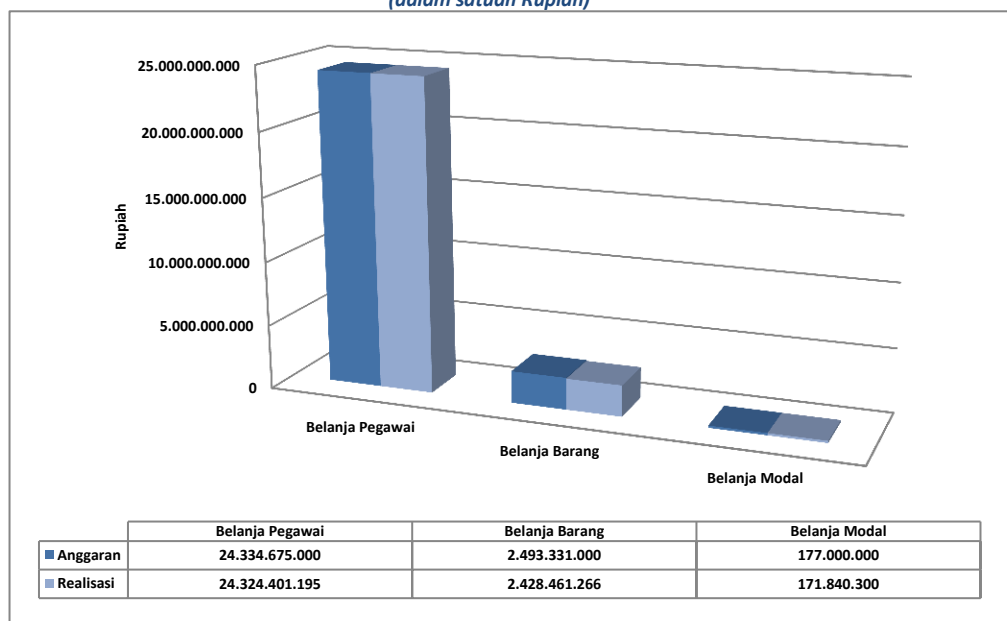
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.26.925.496.817,- atau sebesar 99.714% dari anggaran senilai Rp.27.005.006.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	24.334.675.000	24.324.401.195	99,96
Belanja Barang	2.493.331.000	2.428.461.266	97,40
Belanja Modal	177.000.000	171.840.300	97,08
Total Belanja Bruto	27.005.006.000	26.924.702.761	99,70
Pengembalian Belanja	-	1.970.528	0
Total Belanja Netto	27.005.006.000	26.922.732.233	99,70

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2019 & 2018

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	24.324.401.195	21.954.192.750	2.370.208.445	10,80
Belanja Barang	2.428.461.266	1.888.567.557	539.893.709	28,59
Belanja Modal	171.840.300	187.500.000	(15.659.700)	-8,35
Total Belanja	26.924.702.761	24.030.260.307	2.894.442.454	12,04

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp.24.324.401.195
,-

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 31 Desember 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.24.324.401.195,- dan Rp.21.954.565.000,- Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.658.891.800	4.174.321.700	484.570.100	11,61
Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.390	50.155	4.235	8,44
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	412.504.730	374.464.870	38.039.860	10,16
Belanja Tunj. Anak PNS	71.734.844	75.135.502	(3.400.658)	-4,53
Belanja Tunj. Struktural PNS	97.040.000	85.095.000	11.945.000	14,04
Belanja Tunj. Fungsional PNS	15.430.850.000	13.951.060.000	1.479.790.000	10,61
Belanja Tunj. PPh PNS	2.965.381.987	2.672.698.583	292.683.404	10,95
Belanja Tunj. Beras PNS	157.513.500	159.830.940	(2.317.440)	-1,45
Belanja Uang Makan PNS	512.524.000	432.296.000	80.228.000	18,56
Belanja Tunjangan Umum PNS	19.150.000	29.240.000	(10.090.000)	-34,51
Belanja Uang Lembur	-	-	-	0,00
Total Belanja Brutto	24.325.645.251	21.954.192.750	2.371.452.501	10,80
Pengembalian Belanja	1.244.056	1.970.549	(726.493)	-37
Total Belanja Netto	24.324.401.195	21.952.222.201	2.372.178.994	10,81

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.2.428.461.266,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 31 Desember 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.2.428.461.266,- dan Rp.1.888.567.557,-.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	992.222.549	721.507.132	270.715.417	37,52
Belanja Barang Non Operasional	-	23.609.550	(23.609.550)	(100,00)
Belanja Jasa	806.037.287	264.582.850	541.454.437	204,64
Belanja Pemeliharaan	539.454.230	742.405.107	(202.950.877)	(27,34)
Belanja Perjalanan Dinas	90.747.200	136.462.918	(45.715.718)	(33,50)
Total Belanja Brutto	2.428.461.266	1.888.567.557	539.893.709	28,59
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Total Belanja Netto	2.428.461.266	1.888.567.557	539.893.709	28,59

B.5. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal
:Rp.171.840.300,-*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 31 Desember 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.177.000.000,- dan Rp.187.500.000,-.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	171.840.300	187.500.000	(15.659.700)	(8,35)
Total Belanja Brutto	171.840.300	187.500.000	(15.659.700)	(8,35)
Pengembalian Belanja	-	-	-	-
Total Belanja Netto	171.840.300	187.500.000	(15.659.700)	(8,35)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp.0,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum di pertanggung jawabkan atau belum di setorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan

C.3. Kas Lainnya Setara Kas

Tidak terdapat Kas Lainnya Setara Kas

C.4. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi: Rp.0,-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
per 31 Desember 2019

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
	Jumlah	0	0

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	0

Bagian Lancar
Tagihan TGR:
Rp.0,-

C.5. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan TP/TGR (Netto) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Bagian Lancar
TP/TGR : Rp.0,-

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.(8.426),-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. , sedangkan per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp.0,. Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur :

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
1.	-	-	-	-	-
Total					

C.8. Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.449.631,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018

Jenis	2019	2018
Pembayaran Sewa Rumah Dinas	-	449.631
JUMLAH	-	449.631

C.9. Pendapatan yang Masih Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Diterima pada DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

C.10. Persediaan

Persediaan:
Rp.18.365.060,-

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.18.365.060,- dan Rp.26.789.925,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau, untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sudah melakukan Opname Fisik barang Persediaan dengan Berita Acara Stock Opname Nomor : W9-A/2520/PL.03/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 dengan kondisi Baik. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	16.376.515	24.448.095
2	Amunisi	-	-
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.988.545	2.341.830
4	Suku Cadang	-	-
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	-	-
7	Barang dalam Proses	-	-
8	JUMLAH	18.365.060	26.789.925

C.11. Piutang Tagihan TP/TGR

*Piutang
Tagihan
TP/TGR Rp.0,-*

Nilai Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.1.676.768,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara.

C.12. Tagihan TP/TGR (Netto)

*Tagihan
TP/TGR Rp.0,-*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan TP/TGR (Netto) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp.0,-*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14. Tanah

Tanah:
Rp.20.367.671.000,- Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.20.367.671.000,- dan Rp.21.710.894.000,-

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 201 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	732 M2	124	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	5.151.927.000
2.	2	598 M2	598	Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	15.215.744.000
Jumlah						20.367.671.000

Tanah bangunan rumah Negara Golongan I dengan luas 1.309 M2 terdiri dari :

- Luas 732 M2 di jalan H. Sinen Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan di peruntukan untuk Rumah Dinas Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan senilai Rp. 6.495.150.000,-

C.15. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin :
Rp.4.573.226.376,- Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.4.573.226.376,- dan Rp.4.317.330.476,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	4.317.330.476
Mutasi Tambah	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	-
Pembelian	171.840.300
Transfer Masuk	84.055.600
Mutasi Kurang	
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2019	4.573.226.376
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	(4.191.670.576)
Nilai Buku 31 Desember 2018	381.555.800

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

- a. Pembelian CCTV senilai Rp.29.890.300,-
- b. Perkakas Kantor Lainnya senilai Rp.11.275.000,-
- c. Pembelian AC Split senilai Rp.36.300.000,-
- d. Pembelian Televisi senilai Rp.6.875.000,-
- e. Pembelian Laptop senilai Rp.87.500.000,-

Transfer Masuk dari Mahkamah Agung RI berupa :

1. UPS senilai Rp.35.306.000,-
2. PC Unit senilai Rp.48.749.600,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :*
Rp.3.485.802.000,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.3.485.802.000,- dan Rp.2.646.375.000,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	2.646.375.000
Mutasi Tambah	
Koreksi IP	839.427.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	3.485.802.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	217.920.196
Nilai Buku 31 Desember 2018	3.267.881.804

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan :*
Rp.49.563.000,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.49.563.000,- dan Rp.49.563.000,-

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	49.563.000
Mutasi Tambah	

Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	49.563.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	12.390.750
Nilai Buku 31 Desember 2019	37.172.250

Rincian asset tetap Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.20.865.646,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.20.865.646 dan Rp.20.865.646,-

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	20.865.646
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	20.865.646
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-
Nilai Buku 31 Desember 2019	20.865.646

Nilai dan perhitungan asset tetap lainnya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp.(4.421.981.522
),-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.(4.421.981.522),- dan Rp.(4.125.436.779),-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.573.226.376	4.191.670.576	381.555.800
2	Gedung dan Bangunan	2.646.375.000	99.664.545	2.546.710.455
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	49.563.000	11.151.674	38.411.326
4	Aset Tetap Lainnya	20.865.646	-	20.865.646
	Jumlah	7.290.030.022	4.302.486.795	2.987.543.227

C.21 Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :
Rp.34.075.000,-*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.34.075.000,- dan Rp.34.075.000,- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa Software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan Adapun rincian ATB per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	34.075.000
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2019	34.075.000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2019	34.075.000
Nilai Buku per 31 Desember 2019	-

Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Perkara	5.500.000
2.	Aplikasi TV Media	3.575.000
3.	Aplikasi Statistik Kepegawaian	12.500.000
4.	Aplikasi Statistik Perkara	12.500.000
Jumlah Total		34.075.000

C.22 Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp.3.502.880,-*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.3.502.880,- dan Rp.440.101.526,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	440.101.526
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	436.598.646
Saldo per 31 Desember 2019	3.502.880

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp.(4.421.981.522),- dan Rp.(4.125.436.779),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	3.502.880	3.502.880	-
Software	34.075.000	34.075.000	-
JUMLAH	37.577.880	37.577.880	-

C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp.0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga:
Rp.82.030.690,-*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.82.030.690,- dan Rp.57.610.708,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Kekurangan Gaji	15.320.420	Pembayaran Kekurangan Gaji
2.	Uang Makan	40.277.000	Pembayaran Uang Makan bulan Desember 2019
3.	Langganan Koran	640.000	Pembayaran Koran bulan Desember
4.	Jasa Listrik	18.458.220	Pembayaran Listrik atas beban Desember
5.	Jasa Telepon	1.813.007	Pembayaran Telepon atas beban Desember
6.	Jasa Air	4.534.543	Pembayaran Air atas beban Desember
7.	Biospray	987.500	Pembayaran biospray Desember
Jumlah		57.610.708	

*Pendapatan Diterima
di Muka:
Rp.0,-*

C.26 Pendapatan diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah Rp.0,- dan Rp.449.631,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Masih
Harus Dibayar:
Rp.82.030.690,-*

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp.82.030.690,- dan Rp. 57.610.708,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018
Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar	82.030.690	57.610.708
JUMLAH	82.030.690	57.610.708

C.28 Ekuitas

*Ekuitas:
Rp.24.011.480.870,-*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.24.011.480.870,- dan Rp. 24.588.320.929,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :*
Rp.28.210.961,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.28.210.961,- dan Rp. 23.221.643,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.873.000	22.495.930	133,33
2	Pendapatan Pemindahtanganan BMN	-	7.001.090	-
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	5.265.401	-
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	740.000	-
Total Pendapatan		16.873.000	35.502.421	210,41

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp.24.345.420.615,-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.24.345.420.615,- dan Rp. 21.977.762.121,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.659.849.800	4.173.865.500	485.984.300	11,64
Beban Pembulatan Gaji PNS	54.494	50.155	4.339	8,65
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	412.600.530	374.419.250	38.181.280	10,20
Beban Tunj. Anak PNS	71.734.844	75.135.502	(3.400.658)	(4,53)
Beban Tunj. Struktural PNS	97.040.000	85.095.000	11.945.000	14,04
Beban Tunj. Fungsional PNS	15.438.170.000	13.948.140.000	1.490.030.000	10,68
Beban Tunj. PPh PNS	2.970.848.503	2.671.473.323	299.375.180	11,21
Beban Tunj. Beras PNS	157.513.500	159.830.940	(2.317.440)	(1,45)
Beban Uang Makan PNS	519.703.000	462.483.000	57.220.000	12,37
Beban Tunjangan Umum PNS	19.150.000	29.240.000	(10.090.000)	(34,51)
Beban Uang Lembur	-	-	-	-
Total Beban Pegawai	24.346.664.671	21.979.732.670	2.366.932.001	10,77

D.3. Beban Persediaan

**Beban
Persediaan :**
Rp.98.560.430,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.98.560.430,- dan Rp.65.648.035,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	98.560.430	65.348.035	33.212.395	50,82
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	7.847.333	6.436.020	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-	-
Beban Persediaan Pita, Cukai, Materai & Leges	-	-	-	#DIV/0!
Total Beban Persediaan	106.407.763	71.784.055	34.623.708	48,23

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban Barang
dan Jasa :**
Rp.1.705.254.583,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.705.254.583,- dan Rp.940.870.988,-. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	629.346.498	568.503.732	60.842.766	10,70
Beban Pengiriman Surat Dinas	1.580.700	874.200	706.500	80,82
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	74.040.000	82.920.000	(8.880.000)	(10,71)
Beban Sewa	518.949.000	-	518.949.000	-
Beban Bahan	-	23.609.550	(23.609.550)	(100,00)
Beban Langganan Listrik	249.882.582	227.833.324	22.049.258	9,68
Beban Langganan Telepon	22.630.955	23.324.410	(693.455)	(2,97)
Beban Langganan Air	18.207.172	13.405.772	4.801.400	35,82
Beban Jasa Lainnya	-	400.000	(400.000)	(100,00)
Total Beban Jasa	1.514.636.907	940.870.988	573.765.919	60,98

D.5. Beban Pemeliharaan

**Beban
Pemeliharaan:**
Rp.546.432.203,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.546.432.203,- dan Rp.749.710.487,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192.446.935	335.641.660	(143.194.725)	(42,66)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22.947.850	89.713.700	(66.765.850)	(74,42)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323.190.085	317.919.107	5.270.978	1,66
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-	-
Total Beban Pemeliharaan	538.584.870	743.274.467	(204.689.597)	(27,54)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.90.747.200,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.90.747.200,- dan Rp.136.462.918,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	62.695.600	70.384.978	(7.689.378)	(10,92)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	15.750.000	47.641.040	(31.891.040)	(66,94)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	12.301.600	18.436.900	(6.135.300)	(33,28)
Total Beban Perjalanan Dinas	90.747.200	136.462.918	(45.715.718)	(33,50)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0,-*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk	-	-	-	-
Total Beban Barang untuk	-	-	-	-

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-
Total Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.265.457.171,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.265.457.171,- dan Rp.474.176.526,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	172.968.796	172.968.796	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.443.030	66.443.030	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.239.076	1.239.076	-	-
Jumlah Penyusutan	240.650.902	240.650.902	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-	-
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	240.650.902	240.650.902	-	-

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp.0-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.(8.426),-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	-	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	-	(8.426)	8.426	(100)
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	-	(8.426)	8.426	(100)

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp.0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extra Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Beban Aset Extra Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Beban Aset Extra Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Total Beban Lain-lain	-	-	-	-

D.12. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.445.145,-

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.892.868	1.108.463	784.405	71
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	445.145	375.555	69.590	19
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	2.338.013	1.484.018	853.995	58

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0,-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-	-
Total Pos Luar Biasa	-	-	-	-

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.24.588.320.929,- dan Rp.24.672.230.151,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.(27.015.212.428),- dan Rp.(24.088.977.337),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi yakni pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laba rugi perusahaan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan yang diterapkan perusahaan.

E.3.1 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp.534.883.571),- dan Rp.0,-. Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.(503.796.000),- dan Rp.0,-.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.(31.087.572),- dan Rp.0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	1
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	1

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.26.973.255.940,- dan Rp.24.005.068.115,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
Per 31 Desember 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	35.502.421
Ditagikan ke Entitas Lain	26.924.702.760
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	-
Jumlah	26.960.205.181

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp.35.502.421,- sedangkan DKEL sebesar Rp.26.924.702.761,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.84.055.600,-,

lalu karena ada Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.0,- sehingga Nilai Transfer Masuk sebesar Rp.84.055.600,- terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin (UPS)	Mahkamah Agung RI	35.306.000
2	Peralatan dan Mesin (PC)	Mahkamah Agung RI	48.749.600
JUMLAH			84.055.600

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 , sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2019 . Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah Rp.0,-. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak menerima Hibah

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.24.011.480.870,- dan Rp.24.588.320.929,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan oleh BPK pada tahun 2019

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terlampir

F.2.3. Rekening Pemerintah

Daftar Rekening Pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu :

- a. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 0930-01-000015-30-3 a.n. BPG175.PTA JAKARTA (401112) digunakan sebagai Penampung uang APBN untuk DIPA BUA dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,-
- b. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 0930-01-000022-30-0 a.n. BPG175.PTA JAKARTA (401113) digunakan sebagai Penampung Uang APBN untuk DIPA BADILAG dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,-
- c. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 0930-01-000017-30-5 a.n. RPL 175 PTA Jakarta Utk PDT Biaya Perkara digunakan sebagai Pendaftaran Biaya Perkara dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.700.000,-

F.2.4. Revisi DIPA

Mengenai DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdapat revisi anggaran yaitu merevisi POK pada output yang mengalami kekurangan/kelebihan anggaran yaitu:

1. Revisi POK meliputi :

- Pada Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA untuk kegiatan Perjalanan Dinas Biasa
- Pada Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA untuk kegiatan belanja Keperluan Perkantoran
- Pada Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA untuk kegiatan Belanja bahan
- Pada Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA untuk kegiatan Belanja Barang Persediaan
- Pada Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA untuk kegiatan Belanja Pegawai
- Pada Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA untuk kegiatan Belanja Langganan Listrik

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM. SSPB dan SSBP pada tahun ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan surat keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI tanggal 3 Desember 2018 Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tentang Petikan Surat Keputusan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Menunjuk Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/1346/KU.01/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Pengelola Keuangan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun anggaran 2019 dengan anggota sebagai berikut :

- Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Erwin Widanarko, SH. S. AP. M. Pd

- Pejabat Pembuat Komitmen : Una Munasir Fatah, ST. MM
- Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM : Dewi Utari, SE. MM
- Bendahara Pengeluaran : Rizcky Fallah Romadhon
- Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai : Restiana Irwanti, SE
- Staf Pengelola Keuangan : Hadi Putra, A. Md
- Staf Pengelola Keuangan : Restiana Irwanti, SE

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s/d per 31 Desember 2019	Beban Penyusutan 2019	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	Nilai Buku per 31 Desember 2019
A	Peralatan dan Mesin		4.316.705.476	4.014.620.560	172.968.796	4.014.620.560	302.084.916
	Alat Bantu	7	45.909.000	45.909.000	-	45.909.000	-
	Alat Angkutan Darat	7	1.775.474.512	1.775.474.512	22.132.501	1.775.474.512	-
	Alat Kantor	5	433.677.801	403.757.801	14.960.000	403.757.801	29.920.000
	Alat Rumah Tangga	5	943.300.320	897.135.210	15.794.740	897.135.210	46.165.110
	Alat Studio	5	99.642.640	99.642.640	-	99.642.640	-
	Alat Komunikasi	5	27.964.900	27.453.730	340.780	27.453.730	511.170
	Komputer Unit	4	832.159.319	620.602.020	103.974.350	620.602.020	211.557.299
	Peralatan Komputer	4	158.576.984	144.645.647	15.766.425	144.645.647	13.931.337
B	Gedung dan bangunan						
	Bangunan Tempat Tinggal	50	2.646.375.000	99.664.545	66.443.030	99.664.545	2.546.710.455
C	Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	Jaringan Listrik	40	49.563.000	11.151.674	1.239.076	11.151.674	38.411.326
D	Aset Tetap Lainnya		21.490.646				21.490.646
	Bahan Perpustakaan Tecetak		19.115.646	-	-	-	19.115.646
	Kartografi, Naskah dan Lukisan		600.000	-	-	-	600.000
	Alat Bercorak Kebudayaan		1.150.000	-	-	-	1.150.000
	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga		625.000	-	-	-	625.000
E	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Alat Bantu		-	-	-	-	-
	Alat Angkutan Darat		-	-	-	32.974.000	(32.974.000)
	Alat Kantor		61.264.480	-	-	-	-
	Alat Rumah Tangga		83.719.244	-	-	70.156.244	-
	Alat Studio		5.544.550	-	-	5.544.550	-
	Alat Komunikasi		-	-	-	-	-
	Komputer Unit		253.591.080	-	-	238.560.330	-
	Peralatan Komputer		35.982.172	-	-	35.982.172	-
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		7.012.643.476	4.125.436.779	240.650.902	4.125.436.779	2.887.206.697
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP dan ASET LAINNYA		7.034.134.122	4.125.436.779	240.650.902	4.125.436.779	2.908.697.343

